

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDIN KASIM TANJUNG KABUPATEN TABALONG

Yudi Rahman, Risa Rahmawati, Fauziannor

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia

e-mail: yudirahman877@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh *good governance*, *system* pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria dari level *middle-upper management* sejumlah 31 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer dalam bentuk kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* dan *system* pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong. Demikian juga kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong. Implikasi penelitian ini dapat mengukur aspek-aspek apa saja yang menjadi prioritas penulis dalam mengungkapkan kualitas laporan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong.

Kata kunci: *good governance, sistem pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia, laporan keuangan*

Latar Belakang

Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan

oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai, sesuai dengan pendapat Pemerintahan yang baik atau sering disebut *good governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian

tujuan tersebut setiap pemerintahan daerah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sendiri, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Namun pada kenyataannya, permasalahan didalam laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat masih menyisakan permasalahan dan keraguan akan kebenarannya. Uraian diatas sejalan dengan pendapat Hasibuan (2018:45) yang mengatakan bahwa *good governance* merupakan suatu aturan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana pola dan sikap seorang pelaku dilandasi oleh prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan pemerintah yang baik, pasar yang kompetitif dan civil society yang mandiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan LKPD Kabupaten Tabalong khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badarudin Kasim Tanjung bahwa aset tetap, aset lain-lain dan belanja modal dokumen rumah sakit sudah didukung oleh bukti dokumen yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas aset tetap dan aset lainnya. BPK RI memberikan catatan terkait sistem pengendalian intern, pemilik rekening dan asset tetap yang belum dapat diyakini kewajarannya. Serapan anggaran juga belum maksimal. Ini bisa saja dikarenakan sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan belum bekerja secara maksimal. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain *good governance* faktor kualitas sumber daya manusia juga

mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar dan kriteria nilai informasi laporan keuangan yang ditetapkan pemerintah. Uraian di atas bertolak belakang dengan penelitian Leiwakabessy (2018), yang menemukan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang selalu disampaikan tiap tahunnya.

Pendapat Romney dan Steinbart, (2018:196), mengatakan Aspek yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern memiliki beberapa elemen yang sangat penting dalam pengelolaan suatu akuntabilitas daerah, elemen tersebut adalah lingkungan pengendalian, resiko pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Salah satu elemen sistem dasar bagi kegiatan operasional suatu entitas yang aman, sehat dan dapat berkembang secara wajar. Dengan demikian, sistem pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD, uraian teori diatas juga didukung penelitian oleh Tawaqal (2017), yang menemukan bahwa *good governance*, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi bertolak belakang dengan penelitian Maysaroh (2018), yang menemukan sistem pengendalian intern

tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Faktor lainnya yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yakni kualitas sumber daya manusia yakni kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut Menurut Hanaffi (2017: 57), kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan *output* dan *outcomes*. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam pengelolaan keuangan rumah sakit yang baik, satuan kerja ini harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan tugas dan fungsi serta pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika keuangan dengan baik, namun uraian di atas bertolak belakang dengan penelitian Siwambudi (2017), yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis *good governance*, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan; (2) menganalisis *good governance*, sistem pengendalian intern dan

kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan; dan (3) menganalisis manakah diantara variabel bebas yaitu *good governance*, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan.

Studi Literatur

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggantikan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien”. (Sutrisno dalam Dwiyanto, 2019). Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai upaya dan kegiatan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Definisi lain, juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan dana dengan cara yang paling menguntungkan serta mengalokasikan dana secara efisien dalam perusahaan sebagai sarana untuk mencapai sarana bagi kekayaan pemegang saham. (Kamaludin dalam Dwiyanto, 2019).

Good Governance

Good governance sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah *civil society*. *Good governance* biasa juga didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat). Setidaknya sebagian besar masyarakat membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang

lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (dalam Dwiyanto, 2019). Di sisi lain istilah *Good governance* menurut Dwi Payana (2018:45) merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama.

Karakteristik Good Governance. Tata kelola yang baik adalah elemen yang dapat dikontrol untuk mengelola bisnis dan hasil dengan lebih baik, serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas (Jefri, 2018). UNDP mendefinisikan pemerintah sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administratif dalam administrasi urusan nasional di semua tingkatan. Tata kelola terdiri dari mekanisme, proses dan institusi yang kompleks bagi warga Negara dan kelompok untuk mengartikulasi kepentingan masyarakat, menyelesaikan perbedaan masyarakat, dan menjalankan hak dan kewajiban hukum masyarakat.

Indikator Good Governance. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Zeyn (2018) yakni: (1) transparansi, yaitu standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; (2) partisipasi, yaitu penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselerasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan; dan (3) akuntabilitas, hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Tahun 2018). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2018). Dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam Mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. (UU No. 1 Tahun 2018 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2).

Menurut COSO ada beberapa komponen yang harus diperhatikan antara lain: (1) *control environment* (lingkungan pengendalian), merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi; (2) *risk assessment* (penaksiran risiko), yang mana perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan resiko bisnis dan harus menentukan bagaimana caranya mengelola resiko tersebut; (3) *control activities* (kegiatan pengendalian), untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi resiko tertentu yang dihadapi perusahaan; (4)

information and communication (informasi dan komunikasi), yang mana sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah; (5) *monitoring* (pemantauan), yang mana sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak and ke dewan komisaris.

Romney dan Steinbart (2018:196) menetapkan tujuan pengendalian intern sebagai berikut: (1) kegiatan operasi yang efektif dan efisien; (2) keandalan laporan keuangan; dan (3) kesesuaian hukum dan peraturan perundang-undangan

Indikator Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan Manurung (2018) terdapat lima (5) komponen dan 4 unsur pada sistem pengendalian internal pemerintah diantaranya: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; (5) pemantauan; (6) struktur organisasi yang memisahkan tugas; (7) sistem dan Prosedur pencatatan yang baik; (8) praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi; dan (9) pegawai yang bermutu.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Rahardjo (2017:18) menjelaskan pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu: “Kualitas sumber daya manusia itu hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya”.

Menurut Hanaffi (2017), kualitas sumber daya manusia adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kualitas sumber daya manusia mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan.

Menurut Ihsanti (2018), kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kualitas sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan *output* dan *outcomes*. (Warisno, 2018; Sukmaningrum, 2017). mengungkapkan bahwa untuk mengelola keuangan daerah yang baik, pemerintah harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada.

Langkah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Uha (2018:131) mengemukakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan kualitas pendidikan formal PNS menuju pengembangan pembangunan dan membangun wawasan keilmuan.; (2) mengoptimalkan diklat dan peningkatan bimtek untuk mewujudkan kompetensi dan ketrampilan teknis; (3) penyusunan standar

kompetensi jabatan dalam menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; (4) pembinaan karier PNS yang terstruktur dan profesional dengan pola pikir secara umum dan kerja secara spesial dalam riil produksi; dan (5) pengembangan jabatan fungsional menuju spesialisasi dengan kebutuhan tuntutan kerja.

Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia. Hutapea dan Thoha (2018:8) mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia, Komponen ini selanjutnya akan digunakan sebagai indikator penelitian untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di RSUD H. Badarudin Kasim Tanjung, berikut merupakan komponen pembentukan kualitas sumber daya manusia: pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*).

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Farid dan Siswanto dalam Irham Fahmi (2018:2) adalah: laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial”. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (*users*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Sedangkan menurut Myer dalam S. Munawir (2018:5), yang dimaksud laporan keuangan adalah: “Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Sedangkan menurut Sofyan Assauri dalam Irham Fahmi (2018:2) pengertian laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan

merupakan laporan pertanggung jawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya”. Dengan demikian maka pihak manajemen memegang peranan penting dalam membuat laporan keuangan untuk dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan.

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK (2017:3), yaitu: “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi”. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2017 tentang standar akuntansi pemerintahan, terdapat empat karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah akan digunakan sebagai indikator penelitian untuk mengukur kualitas laporan keuangan, berikut merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

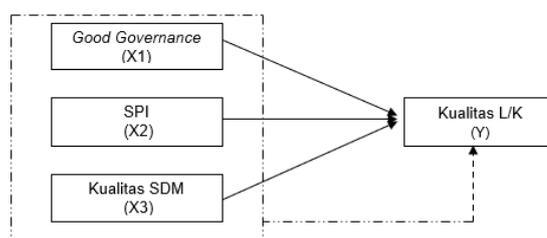
Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Wati, dkk. (2018), meneliti pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD kabupaten Buleleng; (2) Philadelphia, Suryaningrum dan Sriyono (2020), meneliti pengaruh kualitas sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, *good governance* dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan; (3) Sakti (2021), meneliti pengaruh sistem pengendalian internal, *good governance* dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup; (4) Tyas (2020), meneliti pengaruh *good governance*, sistem pengendalian intern pemerintah, kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang; (5) Wijayanti (2017), meneliti pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo; (6) Tua (2015), meneliti pengaruh *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD Kota Dumai; (7) Saraswati (2019), pengaruh *good governance*, kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan; (8) Pilander, dkk. (2018), meneliti pengaruh sistem pengendalian intern, *good governance*, kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah

Kota Kotamobagu; dan (9) Binawati dkk (2022), meneliti pengaruh penerapan akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan.

Kerangka Konseptual

Sistematis penelitian ini dapat digambarkan melalui kerangka konseptual pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Sumber: data diolah (2023)

Hipotesis

Dalam penelitian ini disajikan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh signifikan *good governance*, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.
- H2: Terdapat pengaruh *good governance*, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
- H3: Variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan.

Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel

penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro, 2017). Dari jenis penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian causal comparative untuk menyelidiki kemungkinan hubungan antara variabel satu dengan lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan sebab akibat antar variabel yang akan diteliti yaitu anrta variabel independen berupa good governance, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia dengan variabel dependen berupa kualitas laporan keuangan rumah sakit.

Definisi Operasional Variabel

***Good Governance* (X1)**

Menurut Priansa (2018) *good governance* merupakan suatu sistem dan mekanisme yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, efektif, dan efisien sesuai cita-cita terbentuknya masyarakat madani yang makmur, sejahtera dan mandiri. Indikatornya yaitu (1) Transparansi, (2) Partisipasi dan (3) Akuntabilitas.

Sistem Pengendalian Intern (X2)

PP No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah kegiatan untuk memberikan keyakinan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Indikatornya adalah: (1) Lingkungan Pengendalian: (2) Penilaian Risiko: (3) Aktivitas Pengendalian: (4) Informasi dan

Komunikasi; (5) Pemantauan; (6) Struktur Organisasi; (7) Tugas dan kewenangan; (8) Sistem Prosedur Pencatatan; dan (9) Pegawai yang Kompeten

Kualitas Sumber Daya Manusia (X3)

Menurut Mangkunegara (2012) Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Indikatornya adalah: (1) Pengetahuan; (2) Keterampilan; dan (3) Sikap/Perilaku

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Kualitas laporan keuangan merupakan suatu ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Nordawan dan Hertianti, 2010). Indikatornya adalah: (1) Relevan; (2) Andal; (3) Dapat Dibandingkan; dan (4) Dapat Dipahami

Jenis data terdiri atas data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif, atau informasi yang dapat dinyatakan secara numerik, adalah informasi yang dapat dihitung. Data kuantitatif dalam penelitian ini memberikan informasi tentang jumlah partisipan, serta karakteristik dan jawaban mereka. Data yang tidak dapat dinyatakan secara numerik disebut sebagai informasi kualitatif. Lokasi penelitian, struktur organisasi, dan penjelasan keseluruhan objek penelitian merupakan contoh data kualitatif dalam penelitian ini.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2019:91), data primer adalah bagian dari data yang secara eksplisit mencantumkan detail ke data *feed*. Data

dasar penelitian ini berasal dari partisipan dan ditanyakan identitasnya serta kesannya terhadap variabel bebas dan terikat. Menurut Sugiyono (2019:91) data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pencacah, seperti melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen dan informasi dari situs internal penting yang telah digunakan sebagai bukti penelitian substantif untuk variabel yang diteliti.

Populasi mengacu pada keseluruhan tujuan penelitian ini, demikian menurut Arikunto (2016:134). Populasi penelitian ini adalah Dewan Pengawas RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung yang berjumlah 31 orang.

Menurut Sugiyono (2019), sampel ialah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini didapat melalui teknik *sampling* jenuh yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 responden.

Teknik pengumpulan data terdiri atas teknik lapangan dan teknik kepustakaan. Teknik lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada objek penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini dengan cara: observasi, wawancara, dokumentasi, dan dengan memberikan survei kepada responden dengan jawaban tertutup. Teknik Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca beberapa buku literatur-literatur, mengumpulkan dokumen, arsip, maupun catatan penting yang ada hubungannya dengan

permasalahan penulisan penelitian ini dan selanjutnya diolah kembali.

Teknik analisis data terdiri atas uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Uji instrumen terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui validitas suatu angket, menurut (Ghozali 2016:52), dan pertanyaan dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket tersebut. Peneliti mengadopsi tingkat signifikansi 5% dalam penyidikannya. Jika tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, pertanyaan dikatakan valid; jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, jawaban dikatakan tidak valid. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2019:172). Dasar pengambilan keputusan dengan kriteria, jika nilai Cronbach Alpha > 0,60, maka data reliabel, dan begitu sebaliknya.

Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi model regresi normal atau tidak, sehingga memungkinkan dilakukan uji parametrik. Probabilitas (Asymtotic Significance) juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu: jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal, dan begitu sebaliknya. Uji multikolinearitas terjadi ketika variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau hampir sempurna. Uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana residual untuk semua pengamatan dalam model regresi memiliki varians yang sama.

Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kualitas Laporan Keuangan
 α = Konstanta
 X_1 = *Good Governance*
 X_2 = Sistem Pengendalian Intern
 X_3 = Kualitas Sumber Daya Manusia
 β_1, β_2 = Koefisien garis regresi
 e = error / variabel pengganggu

Uji hipotesis terdiri atas uji F, uji t, uji dominan. Uji F digunakan untuk menguji keberartian dari koefisien regresi secara simultan. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara simultan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada tingkat kepercayaan 95 persen (= 0,05). Akibatnya, baik hipotesis alternatif (H1) dan hipotesis asli (H0) diterima. Uji t digunakan untuk menilai signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai signifikansi untuk pengujian hipotesis parsial ini adalah 5%. Dalam mengukur dan menganalisis variabel dominan, peneliti melihat pada nilai signifikansi atau Beta yang paling besar diantara ketiga variabel bebas yang memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Y).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Instrumen

Uji Validitas

Tabel 1 menunjukkan hasil perhitungan setiap pertanyaan dari variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y dinyatakan valid, dikarenakan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya. Suatu instrumen dikatakan

bagus jika memiliki koefisien Cronbach's alpha $> 0,6$ maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1.1	0.788	0.339	Valid
X1.2	0.517	0.339	Valid
X1.3	0.614	0.339	Valid
X2.1	0.585	0.339	Valid
X2.2	0.549	0.339	Valid
X2.3	0.515	0.339	Valid
X2.4	0.405	0.339	Valid
X2.5	0.585	0.339	Valid
X2.6	0.549	0.339	Valid
X2.7	0.484	0.339	Valid
X2.8	0.420	0.339	Valid
X2.9	0.509	0.339	Valid
X3.1	0.839	0.339	Valid
X3.2	0.816	0.339	Valid
X3.3	0.806	0.339	Valid
Y.1	0.823	0.339	Valid
Y.2	0.806	0.339	Valid
Y.3	0.531	0.339	Valid
Y.4	0.855	0.339	Valid

Sumber: data diolah (2023)

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	Tingkat Koefisiensi	Keterangan
<i>Good Governance</i> (X1)	0,735	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (X2)	0,711	0,60	Reliabel
Kualitas SDM (X3)	0,833	0,60	Reliabel
Kinerja Instansi (Y)	0,798	0,60	Reliabel

Sumber: data diolah (2023)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa semua data berdistribusi secara normal, karena dapat dilihat bahwa hasil uji menunjukkan angka probabilitas $0,200 > 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa *coefficients* kolom *tolerance* dan

VIF. Semua nilai *tolerance* dari ketiga variabel bebas > 0,10 dan VIF dari ketiga variabel bebas < dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada ketiga variabel bebas tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Pada hasil penelitian terlihat bahwa data yang menyebar secara acak dan dapat disimpulkan bahwa tidak adanya terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10.649	6.319			4.685.004		
GD	.049	.301	.031	1.862.003	.931	1.074	
SPI	.214	.150	.296	2.425.001	.790	1.266	
KSDM	.176	.255	.143	1.890.006	.793	1.262	

Sumber: data diolah (2023)

Tabel 3, dari hasil perhitungan variabel dapat disusun dalam suatu model berikut:

$$Y = 10.649 + 0.049 X_1 + 0.214 X_2 + 0.176 X_3 + e$$

Hasil dari analisis diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut ini. Konstanta sebesar 10.649 menyatakan bahwa jika *good governance*, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia diabaikan atau sama dengan nol, maka kualitas laporan keuangan adalah sebesar 10.649.

Koefisien regresi linear berganda variabel *good governance* adalah sebesar 0.049. Artinya bahwa setiap kenaikan *good governance* sebesar 1 satuan maka kualitas laporan keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0.049.

Koefisien regresi linear berganda variabel sistem pengendalian intern adalah sebesar 0.214. Artinya bahwa setiap kenaikan sistem pengendalian intern sebesar 1 satuan maka kualitas laporan

keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0.214.

Koefisien regresi linear berganda variabel kualitas sumber daya manusia adalah sebesar 0.176. Artinya bahwa setiap kenaikan kualitas sumber daya manusia sebesar 1 satuan maka kualitas laporan keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0.176.

Besarnya Nilai Adjusted R square adalah 0,078 hal ini berarti bahwa variabel independen dapat memengaruhi variabel dependen sebesar 7,8 %, sedangkan sisanya sebesar 92,2 % dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa masih terdapat variabel independen lainnya yang memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Uji Hipotesis

Uji F

Nilai F_{tabel} dilihat pada tabel statistik untuk signifikan 0,05 dengan $dF1 = (K-1)$ dan $dF2 = (n-k)$, dimana $k =$ jumlah variabel (bebas+terikat) dan $n =$ jumlah sampel pembentuk regresi. Jadi, $dF1 = (4-1) = 3$ dan $dF2 = (31-4) = 27$. Hasil yang diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 2,922.

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	8.289	3	2.763	19.766	.003 ^b
Residual	97.388	27	3.607		
Total	105.677	30			

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh F_{hitung} sebesar 19.766 dengan taraf signifikansi $0.000 < 0,05$. Dengan demikian $F_{hitung} 19.766 > F_{tabel} 2,922$ dan sig. $0,000 < 0,05$. Sehingga disimpulkan H_1 diterima, yang berarti variabel *Good Governance*, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia secara bersama-sama

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badarudin Kasim Tanjung Provinsi Kalimantan Selatan.

Uji t

Nilai t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik untuk signifikansi 0,05 dengan $df = n-k$. Dimana $k =$ jumlah variabel (bebas+terikat) dan $n =$ jumlah sampel pembentuk regresi. Jadi, $df = 31-4 = 27$. Hal ini diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,697.

Tabel 3 menunjukkan bahwa: (1) nilai t_{hitung} variabel X_1 lebih besar daripada nilai t_{tabel} ($1.862 > 1,697$) dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,003 yang berarti bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, H_2 diterima; (2) nilai t_{hitung} variabel X_2 lebih besar daripada nilai t_{tabel} ($2.425 > 1,697$) dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,001 yang berarti bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, H_2 diterima; dan (3) nilai t_{hitung} variabel X_3 lebih besar daripada nilai t_{tabel} ($1.890 > 1,697$) dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,006 yang berarti bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, H_2 diterima.

Uji Dominan

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh variabel yang mempunyai pengaruh dominan antara variabel *good governance*, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan adalah variabel sistem pengendalian intern dengan nilai beta sebesar 0.296 lebih besar dibandingkan dengan variabel *good governance* sebesar nilai 0.031 dan variabel kualitas sumber

daya manusia sebesar nilai 0,143 yang menyatakan semakin baik sistem pengendalian intern, maka akan berpengaruh tinggi terhadap kualitas laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badarudin Kasim Tanjung Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan adalah variabel sistem pengendalian intern (X_3), diterima.

Pembahasan

***Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Secara Simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil pengujian uji F diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan taraf signifikansi $< 0,05$, sehingga disimpulkan H_1 yang menyatakan *good governance*, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Provinsi Kalimantan Selatan, terbukti kebenarannya. Melihat pada tanggapan responden yang mayoritas responden setuju dengan kenyataan yang terdapat pada kuesioner yang diajukan dan merupakan indikator-indikator dari *good governance*, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia terhadap laporan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketiga variabel merupakan faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya peningkatan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sakti (2021) dan Tyas (2020) bahwa *good governance*, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber

daya manusia berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Good Governance Berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian uji t diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan taraf signifikansi $< 0,05$, sehingga disimpulkan H_2 yang menyatakan good governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badarudin Kasim Tanjung Provinsi Kalimantan Selatan, terbukti kebenarannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Sakti (2021) dan Tyas (2020) bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian uji t diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan taraf signifikansi $< 0,05$, sehingga disimpulkan H_2 yang menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badarudin Kasim Tanjung Provinsi Kalimantan Selatan, terbukti kebenarannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Sakti (2021) dan Tyas (2020) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hutapea dan Thoha (2018:8) mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Komponen ini selanjutnya akan digunakan sebagai

indikator penelitian untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di RSUD H. Badarudin Kasim Tanjung. Berdasarkan hasil pengujian uji t diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan taraf signifikansi $< 0,05$, sehingga disimpulkan H_2 yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badarudin Kasim Tanjung Provinsi Kalimantan Selatan, terbukti kebenarannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Sakti (2021) dan Tyas (2020) bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Dominan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian uji dominan diketahui bahwa pengendalian intern memiliki nilai *Standardized Coefficient Beta* tertinggi dibandingkan variabel *good governance* dan kualitas sumber daya manusia. Jadi, H_3 yang menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan terbukti kebenarannya.

Hal ini disebabkan karena dalam pencapaian keberhasilan dibutuhkan pengawasan yang baik dan maksimal. Menurut Hery (2016:159) pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang-Undang serta kebijakan manajemn telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun financial

perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Kesimpulan

Studi ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) *good governance*, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan; (2) *good governance*, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan; dan (3) variabel yang berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badarudin Kasim Tanjung Provinsi Kalimantan Selatan adalah pengendalian intern.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran, sebagai berikut: (1) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sebaiknya RSUD H. Badarudin Kasim Tanjung terus memberikan pelatihan dan juga meninjau lebih lanjut terkait dengan pembuatan laporan keuangan; (2) sebaiknya RSUD H. Badarudin Kasim memberikan pendidikan atau mensosialisasikan kepada pegawai supaya tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan basis akuntansi.; dan (3) RSUD H. Badarudin Kasim telah memiliki aturan mengenai pemisahan tugas tetapi pada kenyataannya pemisahan tugas tersebut belum terlaksana, pegawai tidak terfokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing tetapi juga harus bertanggung jawab pada pekerjaan yang lainnya; dan (4) bagi peneliti selanjutnya agar bisa meneliti variabel bebas yang berbeda terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Binawati, dkk., 2022. Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan.
- Dwiyanto, A. 2008 *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada Universitas Press. Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanaffi, R. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati). Skripsi. IAIN Surakarta. Surakarta:
- Hutapea, P dan Thoah, N 2018. *Kompetensi Pegawai Negeri Sipil*. Gramedia. Jakarta.
- Ihsanti, E. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota). Artikel. Universitas Negeri Padang. Padang:
- Indriantoro, N., dan Bambang, S. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Philadelpia, I.S., Suryaningrum, S., dan Sriyono. 2020. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Pilander, S.M., dkk. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Good

- Governance, Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu.
- Sakti, N.E. 2021. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Good Governance dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Lingkungan.
- Saraswati. 2019. Pengaruh *Good Governance*, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmaningrum, T. 2017. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang:
- Tua, M.B. 2015. Pengaruh *Good Governance*, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Dumai).
- Tyas, V.E.A. 2020. Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang.
- Uha, I.N. 2018. *Manajemen Perubahan: Teori dan Aplikasi pada Organisasi Publik dan Bisnis*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Ulum, I. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar*. UMM Press. Malang.
- Umar, H. 2018. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wati, dkk., 2018. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Buleleng.
- Wijayanti. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo).